

RILIS KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE YOGYAKARTA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023-2024 19-23 FEBRUARI 2024

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta. Tim kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI dipimpin oleh Bapak Aria Bima selaku Pimpinan/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan diikuti oleh 17 anggota Komisi VI DPR RI.

Dalam kunjungan kerja reses tersebut, hadir Asisten Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro. Selain itu hadir juga Direktur Utama PT. Adhi Karya, Direktur Utama PT. Waskita Karya, Direktur Utama PT. Jasa Marga, Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PP), Direktur Distribusi PT. PLN, Direktur Network & IT Solution PT. Telkom Indonesia, Direktur Utama PT. Aviasi Pariwisata Indonesia/Injourney (Holding), Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, dan Direktur Consumer PT. BRI.

Secara umum, Kunjungan Kerja ke Provinsi Yogyakarta ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pembangunan infrastruktur jalan tol dan pengembangan pariwisata beserta UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Pertemuan dalam kunjungan kerja reses ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama lebih berfokus pada pembahasan tentang progres pembangungan prasarana transportasi Jalan Tol Ruas Yogya-Bawen dan Ruas Solo-Yogya-Kulon Progo beserta dukungan teknisnya. Sesi kedua lebih difokuskan pada pembahasan mengenai pengembangan sektor pariwisata di Yogyakarta beserta UMKM pendukungnya

Pada sesi pertama, beberapa mitra dari BUMN Karya yang terlibat dalam pembangunan prasarana transportasi Jalan Tol Ruas Yogya-Bawen dan Ruas Solo-Yogya-Kulon Progo menyampaikan paparan dan laporan terkait progres pembangunan kedua ruas jalan tol tersebut. BUMN itu adalah PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya, PT. Jasa Marga, PT. Pembangunan Perumahan (PP), PT. PLN, dan PT. Telkom Indonesia. Secara garis besar, proyek masih berjalan sesuai rencana meskipun masih dijumpai beberapa masalah. Masalah yang paling banyak dihadapi adalah masalah pembebasan lahan, utamanya lahan yang berupa fasilitas sosial, seperti: sekolah, pemakaman, masjid, dan lain sebagainya. Masalah lain yang dihadapi adalah soal pendanaan proyek. Komisi VI DPR RI menyampaikan sejumlah masukan, *pertama*: pentingnya desain jalan tol yang mempertimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi sektor pariwisata dan UMKM. *Kedua*, perlu koordinasi dan komunikasi yang baik dalam perkara pembebasan lahan, terutama yang terkait dengan lahan milik Kasultanan Yogyakarta. *Ketiga*, perlu dibuat standar pengerjaan proyek jalan tol, berapa biaya standar per kilometernya.

Selanjutnya pada sesi kedua, disampaikan paparan oleh PT. Aviasi Pariwisata Indonesia/Injourney (Holding), PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, dan PT. BRI terkait tema pengembangan sektor pariwisata beserta UMKM pendukungnya. Secara umum, paparan berisi berbagai capaian yang diraih korporasi dalam memajukan pariwisata, baik di Yogyakarta maupun secara nasional. Komisi VI DPR RI menyoroti kinerja BUMN Pariwisata yang terkesan hanya sebagai EO (event organizer) saja, belum sampai pada rencana strategis pengembangan pariwisata nasional yang terintegrasi. Selain itu, Komisi VI DPR juga meminta agar dalam pengembangan pariwisata daerah, BUMN Pariwisata juga mengakomodasi pengembangan UMKM di sekitar lokasi wisata serta beberapa kawasan yang sempat diproyeksikan sebagai bagian dari tujuan wisata unggulan.

Jakarta, 23 Februari 2024 Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Provinsi Yogyakarta